

Menemukan Benang Merah SPMI

oleh: Upi Purnamasari, widyaprada LPMP DKI Jakarta

Program pendampingan sekolah dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah dilaksanakan oleh LPMP DKI Jakarta selama kurun waktu lima tahun. Selama itu pula saya bertugas menjadi salah satu pendamping sekolah, bahkan sempat menjadi penanggungjawab program di tahun 2016 sampai dengan 2019.

Sebagai pendamping sekolah, saya bertugas membimbing, memberikan arahan dan meluruskan jika ada prosedur pelaksanaan program yang belum tepat, ketika diterapkan oleh sekolah. SPMI sebagai sebuah program yang diperkenalkan oleh LPMP merupakan kewajiban sekolah untuk menerapkannya, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 pasal 91: “seluruh satuan pendidikan formal dan non formal wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan”.

SPMI sesungguhnya merupakan pengembangan dari prinsip dasar dalam manajemen yang selama ini sudah sangat dipahami oleh kepala sekolah dan jajaran manajemen. Kepala sekolah sangat *familiar* dengan singkatan *POAC*; *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. Perbedaan SPMI dan *POAC* yaitu, sebelum merencanakan (*planning*), sekolah harus melaksanakan pemetaan terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui program apa yang dibutuhkan sekolah dalam rangka pemenuhan mutu delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu, SPMI menekankan pada fungsi pengendalian agar seluruh tahapan manajemen yang dilakukan mengacu pada SNP.

Sekolah dalam menerapkan SPMI harus direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan. Oleh karena itu pelaksanaannya membutuhkan kerja tim, yang disebut Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Hal ini juga yang menjadi pembeda antara manajemen yang sudah diterapkan sebelumnya di sekolah dan manajemen SPMI. SPMI sudah terpola sedemikian rupa, dan berupa siklus yang harus dilakukan secara teratur tahapan demi tahapan, serta tertib administrasinya. Pada setiap tahapan siklus ada *output* yang dihasilkan yang akan menjadi alat pengendali pelaksanaan SPMI tersebut. Oleh karena itu, jika SPMI dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan maka akan menjadikan sekolah yang berbudaya mutu serta menjadikan mutu sebagai gaya hidup.

Tahun 2020 ini saya mendampingi tiga sekolah dalam satu klaster, dengan pola pendampingan dilaksanakan secara bersamaan untuk ketiganya. Kondisi pandemi Covid-19 dalam pendampingan tahun ini membuat pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tiga sekolah sekaligus cukup dilakukan melalui satu ruang *virtual meeting*. Pendampingan dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun serta kapan dan di manapun kita berada, yang penting terhubung dengan internet.

Sebelum pendampingan, saya telah mempelajari polanya dengan membaca panduan. Terdapat perbedaan strategi pendampingan tahun ini dengan yang saya laksanakan empat tahun sebelumnya. Ada “benang merah” yang hilang antara pelaksanaan SPMI dan *output* di setiap tahapan pendampingan. Awalnya saya bertanya pada diri sendiri “apakah hanya saya saja yang merasakan bahwa pendampingan kali ini ada sesuatu yang terputus dan kurang tersambung antara siklus SPMI dan *outputnya* ? “ Pertanyaan ini muncul karena empat tahun sebelumnya pendampingan selalu dilakukan berdasarkan siklus dan *output* yang dihasilkan mengikuti tahapan siklus tersebut.

Benang merah yang hilang ini saya rasakan juga dialami oleh sekolah saat pendampingan pertama. Terbukti dari tiga sekolah yang saya dampingi, mereka mempresentasikan hasil kerja tim di sekolah masing-masing dengan *output* yang berbeda-beda. Ada sekolah yang mempresentasikan visi, misi dan tujuan sekolah, ada yang mempresentasikan hasil analisis sekolah terhadap delapan SNP yang belum tercapai, dan ada yang mempresentasikan tentang pembelajaran jarak jauh serta inovasi yang mereka lakukan selama pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat saya lebih memilih tidak banyak mereviu serta memberi arahan pada pendampingan pertama.

Hilangnya benang merah antara tahapan siklus SPMI dan *output* kegiatan pendampingan ini, justru memacu saya untuk membaca dan mencermati kembali Permendikbud nomor 28 tahun 2016, yang menjadi landasan operasional dalam menerapkan SPMI. Hasilnya saya rangkum dan tuangkan dalam buku dan bahan tayang yang saya susun dalam bentuk “*flipbook*” dan saya berikan *link* http://gg.gg/BUKU1_SPMP, sehingga dapat dibaca oleh siapapun yang mendapatkan *link* tersebut.

Pendampingan ke-2, sekolah mempresentasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP), yang dikaitkan dengan kondisi Covid-19. Selanjutnya SOP penyusunan RPP dan perangkatnya diterapkan dalam proses pembelajaran jarak jauh. *Output* tersebut dalam siklus SPMI merupakan tahapan ke-tiga yaitu pelaksanaan pemenuhan mutu, terutama untuk memenuhi standar isi dan standar proses dari delapan Standar Nasional Pendidikan. Letak titik hilangnya benang merah antara SPMI dan *output* yang dihasilkan pada pendampingan ke-2 adalah karena siklus seolah-olah tidak dilaksanakan secara utuh. Sekolah langsung pada tahapan ke-3 dan ada dua tahapan yang tidak di terapkan, yaitu pemetaan mutu (tahapan ke-1) dan penyusunan rencana peningkatan mutu (tahapan ke-2)

Pendampingan SPMI di sekolah pada tahun-tahun sebelumnya menekankan pada keterlaksanaan siklus secara utuh dan *output* masing-masing di setiap siklus tersebut. Itulah mengapa sebagian pendamping terutama yang telah bertugas di tahun ke-5, merasakan ada benang merah yang hilang. Sesungguhnya ke dua tahapan tidak dilaksanakan ketika pendampingan, karena sudah dilakukan sebelumnya saat pembekalan SPMI bagi TPMPS. Namun tidak semua pendamping menjadi fasilitator saat pembekalan TPMPS, sehingga ketika pelaksanaan tugas mendampingi sekolah, sebagian pendamping termasuk saya mempertanyakan ke dua tahapan tersebut yang seolah-olah tidak dilaksanakan.

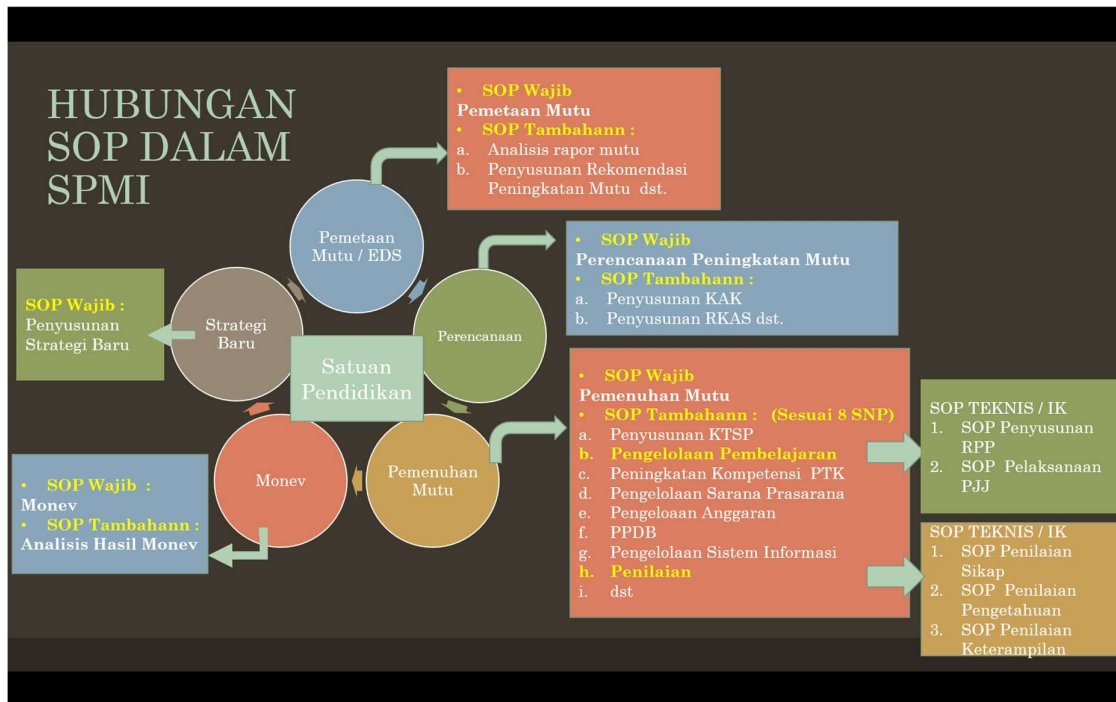
Untuk mempertegas dan menambah pemahaman sekolah dalam menerapkan SPMI, pada pendampingan ke dua saya menekankan siklus dengan *output* yang dihasilkan pada setiap tahapan. Saya membuat bagannya untuk lebih dipahami sekolah, yaitu sebagai berikut :

SIKLUS dan *OUTPUT* dalam SPMI :



Selain bagan tersebut di atas, saya juga membuat bagan yang menggambarkan kaitan pelaksanaan siklus dengan Standar Operasional Prosedur yang menjadi output utama dalam pendampingan sekolah tahun 2020. Bagan ini saya buat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Saya melihat pemahaman dan istilah yang digunakan oleh sekolah dalam menyusun SOP sangat beragam, ada yang menyebutnya SOP, ada POS, ada Petunjuk Kerja, Instruksi kerja, Prosedur kerja dan sebagai. Format yang digunakannyapun juga bermacam-macam, sehingga saya menyarankan untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam Permenpan tersebut.

Bagan kaitan Siklus SPMI dan SOP yaitu sebagai berikut:



Ke dua bagan di atas, saya buat berdasarkan pengalaman pribadi dalam menerapkan manajemen pada pekerjaan sehari-hari. Pada bagan tersebut jelas terlihat benang merah antara siklus SPMI dan *output* setiap tahapan, serta benang merah antara SPMI dan SOP yang harus dimiliki sekolah jika ingin menerapkan SPMI secara utuh dan lengkap. Rangkuman tentang SOP dari Permenpan RB tersebut dapat diakses pada link berikut: http://gg.gg/BUKU2_DOKUMEN_SPMI.

Sepekan setelah pendampingan ke-2, dilanjutkan dengan pendampingan ke-3, di sini TPMPS mempresentasikan hasil kerja mandiri dan juga memperbaiki *output* sebelumnya. Ketiga sekolah mulai terarah saat menyampaikan presentasi masing-masing. Perbedaan di antara ketiganya sudah tidak terlalu jauh. Ada satu presentasi sekolah yang menarik perhatian saya yaitu dari SMP Negeri 131 Jakarta. Sekolah ini menyampaikan dokumen SPMI yang mereka rancang. Ibu Naili yang mewakili tim, di awal presentasi menyampaikan bahwa “dokumen disusun dengan menyatukan *file-file* yang terpisah satu dengan lainnya ibarat merangkai potongan-potongan *puzzle* menjadi satu kesatuan yang utuh.”

Kalimat itu yang akhirnya menyemangati saya untuk memberikan arahan lebih lanjut dan secara khusus mereviu lebih mendalam dokumen yang mereka susun. Saya merasakan bahwa SMPN 131 Jakarta juga telah menemukan benang merah

antara SPMI dan dokumen yang mereka sudah miliki selama ini. Setelah pendampingan ke-3 secara khusus saya mengadakan pertemuan virtual dengan mereka. Saya mengarahkan dan membimbing serta bersama mereka menyatukan potongan-potongan *puzzle* berupa dokumen, yaitu Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Surat Keputusan / SK TPMPS, Pernyataan Komitmen Bersama untuk menerapkan SPMI, siklus SPMI yang dilakukan sekolah dan yang lainnya dirangkai dan disatukan menjadi **Dokumen Kebijakan**. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki sekolah dirangkai menjadi **Dokumen Standar**, serta format-format yang dimiliki sekolah termasuk format presensi siswa, format RPP, format penilaian dan sebagainya dirangkai menjadi **Dokumen Formulir**. Itulah mengapa dikatakan bahwa melaksanakan SPMI ibarat menyatukan potongan-potongan *puzzle* menjadi satu kesatuan yang utuh dan jelas bentuk rupanya.

Tanpa disadari kegiatan merangkai dokumen-dokumen tersebut sama artinya bahwa TPMPS SMPN 131 telah melaksanakan salah satu tugas dan wewenangnya dalam menerapkan SPMI yaitu menyusun dokumen. Sesuai Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 di pasal 11 yang menegaskan bahwa “satuan pendidikan melaksanakan SPMI dengan cara direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan dan untuk melaksanakannya sekolah harus memiliki dokumen, minimal terdiri atas: dokumen kebijakan, dokumen standar dan dokumen formulir.

Hasil pendampingan khusus untuk SMPN 131 Jakarta, menjadi bahan arahan dan paparan saya untuk sekolah lainnya di dalam klaster pada pendampingan ke-4. Ke tiga sekolah mempresentasikan hasil kerja mandiri di kelompok masing-masing yaitu berupa video pembelajaran. Selain itu mereka mempresentasikan kesimpulan yang mereka peroleh selama lebih kurang 2 (dua) bulan didampingi dalam menerapkan SPMI. Saya merangkum keseluruhan dalam empat kali pertemuan kemudian mengarahkan seluruh kepala sekolah dan TPMPS di klaster 13, untuk dapat menerapkan SPMI secara terus menerus dan berkesinambungan. Selain itu saya meminta agar jangan menjadikan SPMI hanya sebagai basa basi dan pengetahuan semata, tetapi betul-betul diwujudkan untuk membawa sekolah pada peningkatan mutu yang nyata dan terukur. Sehingga jargon SPMI “mutu adalah budaya prestasi adalah tradisi” yang sering digaungkan oleh Pak Lubis (Pengawas SMA) dapat terwujud.

Melalui kegiatan pendampingan SPMI tahun ini, sekolah akhirnya memahami bahwa sesungguhnya SPMI bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Seluruh proses yang mereka laksanakan dalam kesehariannya mengelola sekolah, merupakan bagian dari SPMI. Mereka cukup merangkai potongan-potongan *puzzle* dalam proses manajemen sekolah menjadi satu rangkaian yang utuh dan bermakna. Selanjutnya temukan benang merah antara manajemen yang dilaksanakan di sekolah dan SPMI, sehingga sekolah meyakini bahwa sesungguhnya SPMI telah mereka terapkan, hanya perlu diwujudkan dalam dokumen sebagai bagian dari bukti fisik.

Dokumen kebijakan yang saya rangkai bersama TPMPS SMPN 131, dapat diakses pada *link* berikut: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/bukuSPMI1>. Dokumen Kebijakan dan dokumen lainnya dalam implementasi SPMI tidak ada format bakunya, tetapi sekolah dapat mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Prinsipnya dokumen disusun sehingga sekolah mempunyai panduan dan acuan ketika melaksanakan SPMI. Dokumen kebijakan pada *link* di atas, merupakan contoh yang formatnya dapat digunakan oleh sekolah lain dalam menerapkan SPMI, namun isi dokumen adalah milik SMPN 131 Jakarta. Sehingga sekolah dapat menyesuaikan isinya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Dokumen SPMI jangan hanya menjadi hiasan atau pajangan di lemari atau di meja kepala sekolah, maka buatlah dokumen tersebut tidak hanya berwarna hitam dan putih. Sesuai perkembangan zaman saat ini maka dokumen dapat dibuat semenarik mungkin dengan warna dan gambar yang tepat. Selain itu saya menyarankan agar dokumen kebijakan dapat disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dengan mudah dan murah dengan menjadikannya sebagai *flipbook* yang bisa diakses secara *on line*. *Link* dokumen dapat disampaikan dalam grup sosial media yang dimiliki sekolah, sehingga seluruh warga sekolah dapat mengakses dan membaca isinya.

Seluruh warga sekolah memiliki peran dalam menyukseskan SPMI. Manajemen apapun yang diterapkan di sebuah organisasi tidak akan berdaya guna tanpa dukungan semua pemangku kepentingan dan tanpa adanya komitmen bersama untuk mengimplementasikannya. Melalui SPMI, sekolah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu berdasarkan delapan standar nasional pendidikan dan menjadikan SPMI sebagai budaya mutu dan gaya hidup.